

# Kepentingan Taiwan Menginisiasi Normalisasi Hubungan dengan Cina Pasca Krisis Taiwan Tahun 2000-2004

Kadek Kara Pryamedha Artha<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, Anak Agung Ayu Intan Prameswari<sup>3)</sup>  
<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: pryamedhaartha@unud.ac.id, rainypriadarsini@unud.ac.id, prameswari.intan@unud.ac.id

## ABSTRACT

*Taiwan Strait crises started when China conducted missiles trials near Taiwan sea on 1995-1996. China used missile trials as a form of deterrence to end Taiwan independent movement. The missile trials ended in 1996, however China established another deterrence move by preparing military army facing to Taiwan border. This is the main cause of Taiwan insecurity after the end of crises. Disparity military power between Taiwan and China has made Taiwan more insecure. This circumstance described on asymmetrical relations theory which explains that weak states tend to feel dilemma and paranoid when strong state takes an action because strong states has the capability to control situation. As a response, Taiwan had to initiate normalization with China to stabilize situation. Although for 50 years long, Taiwan had confidence for not making a contact with China. But Taiwan urgently needs to protect their national interest by initiating normalization.*

**Keywords:** *Taiwan Strait crises, asymmetrical relations, normalization initiation, national interest.*

## 1. PENDAHULUAN

Hubungan antara Taiwan dan Cina sangatlah kompleks. Akar permasalahannya adalah mispersepsi mengenai eksistensi Taiwan. Taiwan merasa memiliki legitimasi disebut sebagai sebuah negara karena memenuhi syarat *de facto* dan *de jure*. Walaupun perlu diakui negara-negara yang mengakui Taiwan hanya negara-negara kecil di Benua Afrika dan Amerika Selatan (Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), 2009). Sementara bagi Cina, Taiwan diklaim sebagai bagian dari Cina. Taiwan dianggap tidak lebih sebagai sebuah provinsi. Jika ada indikasi Taiwan mencoba merdeka, Cina akan mencapnya sebagai pembangkangan serius. Kedua pihak bersikeras terhadap posisi mereka

masing-masing tersebut sehingga sejak tahun 1949 kedua negara tidak melakukan kontak (Glantz, 2003).

Pada satu momen tepatnya Bulan Juni tahun 1995, Taiwan melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS). Taiwan mengklaim kunjungan Presiden Taiwan saat itu Lee Teng-hui hanya sebuah kunjungan ke almamater tempat Lee Teng-hui berkuliah, namun Cina tidak terima dengan sikap Taiwan tersebut. Penyebabnya adalah karena AS mengakui kebijakan *One China Policy*. Perlu diketahui *One China Policy* adalah sebuah upaya Cina untuk mencegah Taiwan mendapatkan pengakuan dari aktor-aktor internasional. Negara-negara di dunia dituntut mengakui hanya ada satu Cina (*People's*

*Republic of Cina*) (Chiang, 2004). Taiwan (*Republic of China*) tidak dianggap sebagai sebuah negara. Alhasil kunjungan Taiwan ke AS adalah sebuah 'pelanggaran' terhadap *One China Policy* (Ross, 2000). Terutama karena melibatkan mekanisme pengajuan visa yang notabene hanya bisa dilakukan pada dua negara yang sudah saling mengakui kedaulatannya (Cabestan, 2002). Faktor lainnya dan yang utama adalah akibat Taiwan yang mengindikasikan pembangkangan alias ingin merdeka. Taiwan dianggap menggalang dukungan bagi kedaulatan Taiwan. Cina melihat melalui pidato-pidatonya yang banyak menyindir Cina (Fireside, 1995). Tidak heran kemudian Cina menyoroti Taiwan secara tegas atas permasalahan tersebut.

Kemarahan Cina kemudian berujung pada memanasnya tensi hubungan Taiwan dan Cina. Pemerintah Cina didorong untuk bertindak tegas terhadap perilaku Taiwan. Maka kemudian terjadilah krisis Selat Taiwan tahun 1995-1996. Cina berupaya menunjukkan dominasi dan tekanannya terhadap Taiwan dengan melakukan serangkaian uji coba rudal balistik Cina di Selat Taiwan. Peluncuran misil tersebut sekaligus menjadi pertanda dimulainya krisis Selat Taiwan tahun 1995. Ditambah pula latihan gabungan oleh semua armada militer Cina atau yang disebut dengan *People's Liberation Army* (PLA). Hal tersebut dilakukan Cina untuk menekan sikap Taiwan yang terus mengindikasikan ingin merdeka.

Krisis baru mereda setelah AS dan Cina bermediasi. AS menganggap ada kesalahpahaman antara kedua pihak. AS dan

Cina pun kemudian kembali membangun kepercayaan pasca mediasi tersebut dengan meningkatkan intensitas kunjungan pemerintahan (Pollack, 1997). Selesailah krisis pada tahun 1996.

Setelah mediasi AS dan Cina berlangsung, justru Taiwan ditinggalkan pada posisi yang dilematis. Peluncuran rudal memang sudah berhenti, namun penjagaan militer ekstra ketat dilakukan Cina menghadap ke Taiwan. Taiwan membaca hal yang dilakukan Cina tersebut adalah ancaman serius dan dapat berdampak buruk bagi eksistensi Taiwan. Terutama dengan kemungkinan pecahnya perang terbuka dengan Cina. Seakan-akan Cina siap menurunkan pasukannya untuk menginvasi Taiwan.

Terdoronglah Taiwan kemudian untuk memperbaiki keadaan dengan Cina. Inisiasi normalisasi mulai ditunjukkan pada awal tahun 2000an. Taiwan bersikap cenderung lebih akomodatif terhadap perbaikan hubungan dengan Cina (Shui-bian, 2003). Padahal selama 50 tahun lebih ke belakang, Taiwan sama sekali tidak melakukan kontak kenegaraan dengan Cina. Namun kemudian justru Taiwan yang memulai giat-giat perbaikan hubungan dengan Cina.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Superioritas Cina dalam krisis di Selat Taiwan sangat terlihat. Cina menunjukkan kapabilitasnya terutama secara militer untuk menekan pergerakan kemerdekaan Taiwan. Taiwan tidak ditinggalkan banyak opsi untuk dilakukan sehingga melakukan inisiasi normalisasi Oleh Womack (2006) dalam buku "*China and Vietnam: The Politic of Asymmetry*"

mengatakan jika dalam hubungan asimetris negara kuat menunjukkan sikap agresif, negara kecil akan berusaha mempertahankan eksistensinya dengan melakukan *survival*. Ia menjelaskannya melalui kasus Vietnam dan Cina di era 1980an saat kedua negara berseteru. Cina terus melakukan tekanan dan isolasi terhadap Vietnam akibat ketidaksetujuan Cina terhadap invasi Vietnam ke Kamboja dan keberpihakkannya Vietnam ke Uni Soviet.

Hal tersebut membuat Vietnam menjadi sulit secara akses dan ekonomi. Pada akhirnya opsi strategis Vietnam pun berubah. Kebijakan keterbukaan ekonomi dilakukan Vietnam dengan menerapkan kebijakan inisiatif *Doi Moi*. Keterbukaan Vietnam tersebut yang kemudian berujung pada normalisasi Vietnam dan Cina pada tahun 1990an.

Pola tersebut kemudian yang mencerminkan adanya kemiripan posisi relatif yang dihadapi Vietnam dengan Cina juga Taiwan dengan Cina. Hal tersebut membantu melihat sikap dan perilaku yang dialami negara yang mengalami tekanan dan isolasi atau inferior secara kapabilitas dalam hubungan bilateral.

Selain itu, ketiba-tibaan Taiwan menginisiasi normalisasi hubungan dengan Cina mencirikan adanya sebuah kepentingan yang ingin dicapai Taiwan. Hal tersebut dikarenakan 50 tahun ketiadaan kontak dengan Cina seketika berubah pasca krisis dengan adanya inisiasi normalisasi. Oleh Jakniunaite (2015), negara kecil akan berupaya mempertahankan kepentingan keamanannya dengan berbagai cara dihadapan negara kuat.

Seperti halnya tulisan Jakniunaite dalam jurnal "*A Small State in the Asymmetrical Bilateral Relations: Lithuania in Lithuanian-Russian relations since 2004*" yang menceritakan Lithuania dalam upayanya mencapai kepentingan keamanannya dengan beraliansi. Ancaman utama mereka tentunya adalah Rusia. Rusia cukup berbahaya di mata Lithuania karena sikap-sikap totaliter yang sedikit-banyak berdampak terhadap domestik Lithuania.

Lithuania merasa bahwa mereka harus menjamin kepentingan keamanannya. Lithuania pun kemudian memutuskan beraliansi dengan Uni Eropa (EU) dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Demikian juga dengan pada kasus hubungan Taiwan dan Cina. Taiwan pun mengupayakan sebuah kepentingan namun dengan cara yang berbeda yakni menginisiasi normalisasi. Pola Lithuania tersebut kemudian menjadi acuan kepentingan keamanan dalam hubungan asimetris.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinilai paling mampu menjabarkan kasus kepentingan Taiwan dalam menginisiasi normalisasi hubungan dengan Cina pasca krisis Taiwan tahun 2000-2004. Hal tersebut dikarenakan kualitatif memiliki relevansi lebih dibandingkan dengan melakukan kuantitatif akibat keterbatasan penelitian melibatkan pihak pemerintahan Taiwan. Penelitian kemudian dijelaskan secara eksplanatif.

Unit analisis dalam kasus ini adalah negara. Negara dipilih sebagai unit Analisa

dikarenakan negara bertindak sebagai aktor dalam dinamika isu antara Taiwan dengan Cina. Aktor negara juga menandakan adanya proses pengambilan keputusan yang menjadikan hasil kebijakan ataupun dalam hal ini kepentingan, merupakan hal yang sah dan memiliki legitimasi.

Data dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dan riset internet sehingga data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Studi kepustakaan di antaranya melalui buku, artikel, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sementara riset internet mencakup riset data melalui *website*, *e-book*, artikel daring, dan lain-lain. Tentu data yang dikumpulkan telah dipilih secara teliti agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data-data yang diperoleh antara lain jurnal karya Cabestan (2002) yakni "*Integration without Reunification*", jurnal karya Chiang (2004) yakni "*One-China Policy and Taiwan*", buku karya Womack (2006) yakni "*China and Vietnam: The Politics of Asymmetry*", laporan rilis *Ministry of Foreign Affairs Republic of China* (2009), dan lain-lain.

Data kemudian dianalisis dengan perspektif non-positivistik. Non-positivistik maksudnya adalah dengan menginterpretasi dan mengkritisi suatu isu atau fenomena (Somantri, 2005). Interpretasi dan kritik diperoleh melalui makna intrinsik suatu kejadian, sikap, percakapan, dan hal empiris lainnya (Neuman, 1997).

#### **4. PEMBAHASAN**

Taiwan pada awalnya menunjukkan intensi yang bisa dibilang cukup baik terhadap Cina. Bahkan reunifikasi tidak ditanggapi secara buruk oleh Taiwan jika suatu saat menjadi

solusi bagi Taiwan. Terutama pada tahun akhir 1980an. Presiden Taiwan saat itu, Lee Teng-hui mengatakan,

*"Taiwan and the mainland are indivisible parts of China's territory, and all Chinese are compatriots of the same flesh and blood... When objective conditions are ripe, based on the common will of the Chinese people on both sides of the Taiwan Strait, we hope to be able to discuss the matter of national reunification"*. (Teng-hui, 1992).

Terlihat bahwa pada awalnya Taiwan tidak begitu memperlihatkan intensi yang bersifat provokatif.

Intensi yang berbalik 180 derajat mulai ditunjukkan Taiwan pada awal 1990an. Bisa dikatakan demikian dikarenakan adanya sikap-sikap yang mengarah pro independensi Taiwan. Di antaranya penanaman nilai-nilai nasionalisme di jajaran pemerintahan Taiwan dan diplomasi ke AS yang merupakan penyebab utama terjadinya krisis di Selat Taiwan. Sikap-sikap tersebutlah yang membawa provokasi terhadap Cina sehingga Cina menggunakan militernya sebagai solusinya untuk menekan sikap provokatif Taiwan.

Krisis dimulai pada saat Cina melakukan uji coba misil 90 mil lepas pantai Utara Taiwan pada 18 Juli 1995. Kemudian dilanjutkan 6 misil DF-15 pada rentang tanggal 21-23 Juli. Selain peluncuran uji coba misil, Cina juga melakukan latihan gabungan antara angkatan udara, darat, dan laut Cina.

Selang setahun pun Cina masih tetap melakukan uji coba misil. Tepatnya pada 5 Maret 1996 (Whiting, 2001). Dilanjutkan kemudian pada tanggal 8 Maret 1996 Cina meluncurkan misil M-9. Misil-misil tersebut diarahkan ke dekat tempat-tempat vital Taiwan seperti misalnya ke Pelabuhan Kaoshiung (Garver, 1997).

Krisis berhenti saat misil berhenti diluncurkan. Bermula saat adanya mediasi dari pihak AS dan Cina. AS menyatakan bahwa terjadi kesalahpahaman atas kasus AS dan Taiwan (Pollack, 1997). AS pun kemudian mempertegas tidak akan interventif dengan permasalahan Taiwan-Cina.

Namun situasi pasca krisis keadaan tidak sama sekali membaik bagi Taiwan. Taiwanpun bisa dikatakan masih 'bermain api' kala itu dengan berupaya mengimplementasikan *Two States Theory*. *Two States Theory* merupakan konstitusi yang menegaskan bahwa hubungan Taiwan dan Cina adalah hubungan antar dua negara yang terpisah. Presiden Lee Teng-hui mengungkapkan,

*"The 1991 constitutional amendments have placed cross Strait relations as a state-to-state relationship or at least a special state-to-state relationship, rather than an internal relationship between a legitimate government and a renegade group, or between a central government and a local government"*. (Teng-hui, 1999)

Tidak heran kemudian intensitas penjagaan Cina terhadap Taiwan kemudian ditingkatkan. Walaupun tidak ada peluncuran misil, dipercaya sikap Cina semakin lama semakin bersifat

ofensif. Cina seperti tengah menyiapkan sebuah invasi ke Taiwan.

Tekanan dan isolasi tersebut kemudian membuat Taiwan semakin dilema dan paranoid. Eksistensi Taiwan semakin terancam, entah melalui reunifikasi politik ataupun invasi melalui penggunaan militer. Bagi Taiwan keduanya tidaklah hal baik bagi keberlanjutan eksistensi Taiwan. Namun fokus terdekat Taiwan tentunya adalah pada invasi yang sangat mungkin dilakukan oleh Cina. Hal tersebutlah yang menempatkan Taiwan pada posisi paranoid.

Paranoid itu timbul akibat adanya kesenjangan kapabilitas yang cukup kontras. Kemampuan domestik dan pengaruh Cina di dunia internasional sudah tidak dapat diragukan lagi. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan Taiwan.

Kini, Taiwan harus dihadapkan pada permasalahan militer dengan Cina yang nyatanya Taiwan tertinggal cukup jauh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Cina tengah gencar-gencarnya melakukan modernisasi persenjataan. Hal ini terlihat dari anggaran militer Cina yang mencapai rata-rata di atas 10% dari GDP (Liff & Erickson, 2013). Sementara Taiwan masih harus berkutat dengan permasalahan domestik lainnya sehingga tren menunjukkan penurunan anggaran pertahanan Taiwan (Ministry of National Defense, ROC, 2002). Perbandingan mencolok lainnya adalah secara kuantitas. Sumber daya manusia yang tersedia untuk kegiatan militer bagi Taiwan diperkirakan 6.554.373 jiwa, sementara Cina mencapai 363.051.000 jiwa (Central Intelligence

Agency, 2017). Sebuah perbandingan yang sangat jauh.

Indikator-indikator tersebut di atas semakin menegaskan label peran dalam hubungan asimetris kedua negara. Cina memainkan perannya sebagai negara kuat, Taiwan memainkan perannya sebagai negara lemah. Label tersebut yang menjadi dasar analisis sikap dan arah perilaku suatu negara. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Taiwan berada dalam situasi yang mengarahkan mereka pada kondisi dilema dan paranoid.

Dilema dan paranoid ini semakin dirasakan oleh Taiwan ketika Cina semakin bersikap agresif. Hal tersebut dicerminkan pada saat terjadinya krisis di Selat Taiwan pada tahun 1995-1996. Banyak analisis percaya bahwa konflik terbuka akan segera terjadi.

Namun krisis Selat Taiwan adalah bentuk ketidakseimbangan hubungan asimetris akibat adanya mispersepsi oleh kedua negara. Hubungan yang tidak seimbang tersebut dapat dikembalikan ke garis seimbang dengan mengembalikan respek dan otonomi kembali ke tempat seharusnya. Tentu kembali kepada sikap Taiwan dalam status quo-nya, sehingga Cina merasa bahwa Taiwan tidak menunjukkan adanya intensi perlawanan atau pembangkangan untuk melakukan independensi.

Ini yang mendorong kemudian munculnya inisiatif untuk melakukan normalisasi oleh Taiwan pada awal tahun 2000an. Dimulai dengan adanya inisiatif *Five Noes*. *Five Noes* merupakan inisiatif Presiden saat itu yakni Chen Shui-bian yang berisi, (1) Taiwan tidak akan

independen, (2) Taiwan tidak akan mengubah nama negaranya, (3) Taiwan tidak akan mengadopsi kebijakan *Two State Theory* yang merupakan kebijakan yang mengesankan separatisme dari rezim sebelumnya, (4) Taiwan tidak akan mengadakan referendum, dan (5) Taiwan tidak akan memperlakukan *National Unification Council* atau *Guidelines for National Unification* yang merupakan warisan sejak tahun 1990an. Chen Shui-bian menambahkan,

*"In our sincerity, goodwill and responsible gestures, we have already pledged the following: First, that we would not initiate the inclusion of state-to-state relations into the constitution. Number two, we would not initiate a referendum on the independence-reunification question. Three, we would not propose a change in the national title. And unless Taiwan faces a military attack or invasion from China, we will not declare Taiwan independence."*  
(Shui-bian, 2000)

Terlihat bahwa Taiwan seperti memberikan jaminan untuk tidak merdeka. Seperti menyiratkan Taiwan siap untuk melakukan perbaikan hubungan dengan Cina. Namun dengan syarat tidak adanya serangan militer oleh Cina.

Konsepsi normalisasi oleh Taiwan pun mulai dirancang. Normalisasi oleh Taiwan mencakup tiga area yakni, (1) normalisasi Selat Taiwan, (2) normalisasi sistem ekonomi, dan (3) normalisasi sistem demokrasi. Lengkapnya Chen Shui-bian mengatakan,

*"Before the election, I pledged to push for three areas of normalization – cross-*

*straits normalization, the normalization of the economic system in Taiwan and the normalization of the democratic system. The cross-straits normalization is just as important or even more important than the economic and democratic areas, because only with peace in Taiwan's leader, my task is to protect Taiwan's national security and enhance peace. And only then can we put an end to the corruption and can we reform the constitution as well make reforms in education and the judicial system. The maintenance of peace and coexistence across the straits is the top priority.* (Shuibian, 2003).

Olehnya juga dikatakan bahwa Taiwan siap untuk lebih bersikap konstruktif dan akomodatif. Hal tersebut dipertegas oleh dokumen milik (Mainland Affairs Council & The Executive Yuan, 2004) yang menyatakan sikap Taiwan akan mengarah pada (1) *spirit of goodwill*, (2) *active cooperation*, dan (3) *permanent peace*.

Komitmen tersebut yang menjadi pondasi Taiwan yang lebih akomodatif dan konstruktif. Upaya-upaya konkret pun segera dilakukan di antaranya dengan pebaruan sistem transportasi dagang, dan jasa postal yang disebut *Three Links*. Hal ini untuk memotong jalur yang harus dilalui jika melakukan ketiga kontak tersebut. Perlu diketahui bahwa masyarakat harus melewati Hong Kong atau Macau terlebih dahulu untuk saling akses (Dong, 2004). Melalui *Three Links* Taiwan berharap terjadi lebih banyak kontak langsung dengan Cina (Chen, 2010). dan membantu terbangunnya kepercayaan terhadap kedua pihak (Gao, 2001).

Kemudian inisiatif lainnya adalah dicabutnya restriksi dagang dengan Cina (Fell, 2015). Era sebelum tahun 2000, Taiwan sangat takut jika mengalami ketergantungan dengan Cina. Maka Taiwan menganjurkan kapitalis-kapitalis Taiwan untuk ekspansi ke Asia Tenggara. Hal tersebut diistilahkan dengan kebijakan *Go South*. Namun kini orientasinya telah berbeda. Pengawasan dan restriksi aktivitas dagang ke Cina telah dicabut oleh Taiwan.

Komitmen lainnya oleh Taiwan adalah dengan merancang sebuah konsep negosiasi konkret dengan Cina yakni *One Principle and the Four Major Issues Areas*. Di dalamnya berisikan mekanisme dialog serta isu-isu bersama yang dihadapi kedua negara untuk dapat dibahas. Mekanisme ini diklaim sebagai mekanisme menuju perdamaian dengan Cina.

Dari segala inisiatif tersebut di atas telah sanggup membuktikan bahwa Taiwan telah mengubah sikapnya. Pada awalnya Taiwan bersikap cenderung provokatif yang memancing reaksi keras Cina, namun pasca tahun 2000 Taiwan bersikap konstruktif dan akomodatif dengan menginisiasi normalisasi. Tentu dalam rangka mencegah potensi terjadinya invasi oleh Cina.

Namun Cina tidak bergeming sama sekali dan cenderung mengabaikan segala inisiatif oleh Taiwan (Weismann, 2012). Cina tetap melakukan penjagaan militer yang menghadap ke Taiwan. Pola kemudian menjadi jelas bahwa Taiwan melakukan inisiasi normalisasi adalah upayanya untuk 'membujuk' Cina untuk menarik

pasukan dari basisnya. Ini dipertegas dengan pernyataan Chen Shui-bian yang mengatakan,

*“The biggest wild card in Taiwan-China relations is the threat posed to Taiwan by China’s military. I believe that if the international community puts pressure on China to remove the missiles aimed at Taiwan, renounce the threat of military force, and resume the cross-strait dialogue, this would not only effectively guarantee peace in the Taiwan Strait, but also enhance the stability and prosperity of the entire region.”* (Shui-bian, 2003, p. 334).

Sehingga patut mengatakan bahwa fokus Taiwan dalam menginisiasi normalisasi adalah untuk mencapai kepentingan keamanannya.

Hal ini dianalisa dengan konsep kepentingan yang ditulis oleh Nuechterlein (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. Kepentingan keamanan menjadi kepentingan yang memiliki intensi cukup tinggi atau yang diistilahkan oleh Nuechterlein sebagai *vital issues*. Hal tersebut dikarenakan dua faktor penyebab. Pertama lamanya kasus yang dihadapi kedua pihak. Taiwan dan Cina sudah berurusan dengan permasalahan kedaulatan dari tahun 1949. Ini menandakan kompleksnya permasalahan Taiwan dan Cina sehingga tidak dapat diselesaikan dengan dialog dan mediasi yang sederhana. Kedua adalah kedekatan geografis antara Taiwan dan Cina. Ini menjadi faktor pendorong urgensi bagi Taiwan untuk sangat menghindari kontak senjata dengan

Cina. Cina sangat mudah menguasai Taiwan dalam satu serangan masif (Czulda, 2014).

Kepentingan keamanan Taiwan ini sejalan dengan rilis data oleh *Ministry of National Defense ROC* (2004). Kepentingan nasional Taiwan mencakup, (1) memastikan *survival* dan development Taiwan, (2) melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Taiwan, dan (3) melindungi kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. *Survival* tersebutlah yang mencirikan bahwa Taiwan sedang memperjuangkan kepentingan keamanan pada tahun 2000-2004. Menjamin eksistensi Taiwan akan kemudian menjadi pondasi untuk menerapkan kesejahteraan masyarakat dan kebebasan hak dan demokrasi masyarakat Taiwan.

Taiwan ingin mewujudkan kepentingan keamanannya tersebut tentu untuk keberlangsungan bernegara Taiwan. Objektif-objektif yang coba dicapai Taiwan antara lain, (1) melindungi integritas kedaulatan, (2) mengamankan keberlanjutan pengembangan negara, (3) mencegah konflik militer di Selat Taiwan, dan (4) meningkatkan keamanan dan stabilitas regional. Fokusnya jelas bahwa Taiwan sedang menjaga keutuhan negaranya. Hal tersebut ditegaskan olehh Wakil Ketua *Mainland Affairs Council*, Lim Chong-pin yang mengatakan,

*“Kebijakan kita (Taiwan) harus merefleksikan keseimbangan antara seluruh opini publik dan aspek-aspek permasalahan hubungan di Selat Taiwan dengan memastikan keamanan nasional*



*dan martabat sebagai prioritas tertinggi*".  
(Bellows, 2001)

Sebagai tindak lanjut Taiwan membutuhkan pilar-pilar untuk menopang penyelenggaraan kepentingan keamanannya tersebut. Adapun di antaranya (1) pertahanan kedaulatan Taiwan, (2) pencegahan perang dan strategi koersif Cina, dan (3) perbaikan sistem politik, sosial, dan ekonomi. Kesemuanya terimplementasikan dalam upaya Taiwan menginisiasi dengan Cina.

Sikap Taiwan menginisiasikan normalisasi kemudian semakin jelas dan dapat dielaborasi dengan kepentingan keamanan Taiwan. Inisiasi normalisasi adalah cara Taiwan dalam mempertahankan eksistensi bernegara Taiwan yakni melindungi pemerintahan serta masyarakat Taiwan itu sendiri. Ini dipertegas oleh pernyataan Chen Shui-bian yakni,

*"I once again call on the leadership in Beijing to listen to and respect the true sentiments of Taiwan's 23 million people when they say: "No to missiles; yes to peace." China should remove the missiles deployed across the strait against Taiwan, openly renounce the threat of military force, and join us in rational communication. Only then can we create stability in the Taiwan Strait and prosperity for the Asia-Pacific region."* (Shui-bian, 2003, p. 334).

Taiwan mulai menghilangkan sikap-sikap provokatif mereka dengan menggantinya menjadi *goodwill*. Tentu untuk mencegah invasi yang sangat mungkin dilakukan oleh Cina bila mengingat kapabilitas mereka yang sangat kuat.

Inisiasi normalisasi dipilih mengingat posisi relatif Taiwan tidak menguntungkan sama sekali. Isolasi Cina melalui *One China Policy* menyebabkan dukungan dari internasional sangat minim bagi Taiwan. Hubungan diplomatik yang sukses dijalin Taiwan pun hanya negara-negara kecil yang tidak banyak memiliki signifikansi di kancah internasional. Ditambah lagi Taiwan tidak memiliki peta aliansi yang jelas. Meski dekat dengan AS, nyatanya AS cenderung merapat ke Cina setelah krisis terjadi. AS pun secara terang menyatakan diri tidak ingin terlibat dengan permasalahan Taiwan dan Cina (Gelsing, 2012). Untuk menjadi pihak ketiga mediasi pun AS tidak ingin dilibatkan. Maka dari itu terlihatlah sebuah urgensi Taiwan dalam menginisiasi normalisasi karena *bargain* Taiwan sangatlah kecil dalam menghadapi Cina.

## **5. KESIMPULAN**

Situasi dan kondisi Cina baik saat krisis maupun pasca krisis merupakan situasi yang sangat sulit bagi Taiwan. Taiwan dihadapkan pada dua opsi yang sama-sama mengancam eksistensi Taiwan yakni reunifikasi dan kemungkinan invasi oleh Cina. Cina merasa wajar bagi Cina untuk melakukan tekanan ke Taiwan karena kasus Taiwan dianggap sebagai pembangkangan kedaulatan.

Fokus Taiwan pun kemudian diarahkan pada fokus untuk menjamin eksistensinya tersebut. Terutama dengan sangat mungkin invasi dilakukan oleh Cina mengingat keduanya sangat dekat secara geografis. Cakupan rudal Cina sudah mampu mencapai titik terjauh pulau

Taiwan. Tidak heran Taiwan sangat rapuh dengan kapabilitas Cina.

Terdesaklah Taiwan untuk kemudian segera menurunkan tensi ketegangan yang terjadi pada kedua negara. Opsi agresi sudah tertutup bila melihat Cina yang kapabilitas militernya sangat jauh meninggalkan Taiwan. Opsi aliansi mungkin bagi Taiwan namun kemungkinannya sangat kecil. Masalah utamanya adalah tentu sedikitnya yang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. AS pun yang merupakan mitra dekat Taiwan tidak ingin banyak interventif. Selain itu pergerakan mencari aliansi akan justru memprovokasi Cina dan akan menjadi sangat berbahaya bagi Taiwan sendiri.

Maka dari itu dipilihlah inisiasi normalisasi sebagai upaya mencapai kepentingan keamanan mereka yakni *survival*. Di antaranya melalui *Five Noes*, kebijakan akses terbuka, merancang dialog konstruktif untuk mencapai perdamaian, dan lain-lain. Inisiasi normalisasi timbul akibat tidak memungkinkannya opsi lainnya untuk dilakukan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bellows, T. (2001). Cross straits relations and the Chen Shui-Bian administration. *Asian Journal of Political Science*, 9:1, 66-80.
- Cabestan, J.-P. (2002). Integration without Reunification. *Cambridge Review of International Affairs*, 15:1, 95-103.
- Central Intelligence Agency. (2017). *The World Factbook*. Retrieved May 8, 2018, from Central Intelligence Publications: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>
- Chen, C.-c. (2010). Understanding the Political Economy of Cross-Strait Security: A Missing Link. *Journal of Chinese Political Science*, Vol. 15, Issue 4, 391-412.
- Chiang, F. (2004). One-China Policy and Taiwan. *Fordham International Law Journal*, Volume 28, Issue 1, 1-87.
- Czulda, R. (2014). The Military Security Policy of Taiwan: Current Situation and Challenges for the Future. *Pacific Focus*, Vol. 29, No. 1, 8-43.
- Dong, X. (2004). Taiwan Strait Tunnel and Cross-Strait Economic and Trade Relations. *Marine Georesource and Geotechnology*, Vol. 22, 195-199.
- Fell, D. (2015). The China impact on Taiwan's elections: cross- Strait economic integration through the lens of election advertising. In G. Schubert, *Taiwan and The 'China Impact': Challenges and Opportunities* (pp. 53-69). New York: Routledge.
- Fireside, B. (1995). *Taiwan's Lee speaks at Cornell*. Retrieved August 17, 2017, from UPI: <https://www.upi.com/Archives/1995/06/09/Taiwans-Lee-speaks-at-Cornell/4706802670400/>
- Gao, P. (2001). Bridge over Troubled Water. *Taipei Review*.
- Garver, J. (1997). *Face Off: China, the United States and Taiwan's Democratization*. Seattle: University of Washington Press.
- Gelsing, J. (2012). TAIWAN'S GROWING SECURITY VULNERABILITY: FROM CHEN SHUI-BIAN TO MA YING-JIU. *Asian Affairs*, vol. XLIII, no. II, 253-267.
- Glantz, M. (2003). *Climate Affairs: A Primer*. Santa Monica: Island Press.
- Jakniunaite, D. (2015). A Small State in the Asymmetrical Bilateral Relations:

- Lithuania in Lithuanian-Russian relations since 2004. *Baltic Journal of Political Science*, No. 4, 70-93.
- Liff, A., & Erickson, A. (2013). Demystifying China's Defence Spending: Less Mysterious in the Aggregate. *The China Quarterly*, 216, 805-830.
- Mainland Affairs Council & The Executive Yuan. (2004). *Important Documents on the Government's Mainland Policy*. Retrieved from Mainland Affairs Council Republic of China: [https://www.mac.gov.tw/en/News.aspx?n=8A319E37A32E01EA&sms=2413CFE1BCE87E0E&\\_CSN=DD102593FDB1A032](https://www.mac.gov.tw/en/News.aspx?n=8A319E37A32E01EA&sms=2413CFE1BCE87E0E&_CSN=DD102593FDB1A032)
- Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan). (2009). *Embassies & Missions*. Retrieved December 22, 2017, from Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan): [https://www.mofa.gov.tw/en/Content\\_List.aspx?n=D7B7F1B4196DD582](https://www.mofa.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=D7B7F1B4196DD582)
- Ministry of National Defense, ROC. (2002). *2002 National Defense Report*. Taipei: Ministry of National Defense, ROC.
- Ministry of National Defense, ROC. (2004). *NATIONAL DEFENSE REPORT REPUBLIC OF CHINA*. Taipei: Ministry of National Defense, ROC.
- Neuman, W. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Needham Heights: Allyn & Bacon.
- Nuechterlein, D. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 3, 246-266.
- Pollack, J. (1997). The U.S. and Asia in 1996: Under Renovation but Open for Business. *Asian Survey*, Vol. 37, No. 1, 95-109.
- Ross, R. (2000). The 1995-96 Taiwan Strait confrontation: Coercion, credibility, and the use of force. *International Security*, 25(2), 87-123, 87-123.
- Shui-bian, C. (2000). Will Chinese Fight Chinese? (J. Mann, Interviewer)
- Shui-bian, C. (2003). A Conversation with Chen Shui-bian. *Orbis* 47, no.2, 329-335.
- Somantri, G. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, VOL. 9, NO. 2, 57-65.
- Teng-hui, L. (1992). *Creating the future: Towards a New Era for the Chinese People*. Taipei: Government Information Office.
- Teng-hui, L. (1999). Taiwan Speaks Up: Special State-to-State Relationship, Republic of China's Policy Documents. (D. Welle, Interviewer)
- Weismann, M. (2012). *THE EAST ASIAN PEACE: Conflict Prevention and Informal Peacebuilding*. New York: Palgrave Macmillan.
- Whiting, A. (2001). China's Use of Force, 1950-96, and Taiwan. *International Security Volume 16 issue 2*, 103-131.
- Womack, B. (2006). *China and Vietnam: The Politics of Asymmetry*. New York: Cambridge University Press.